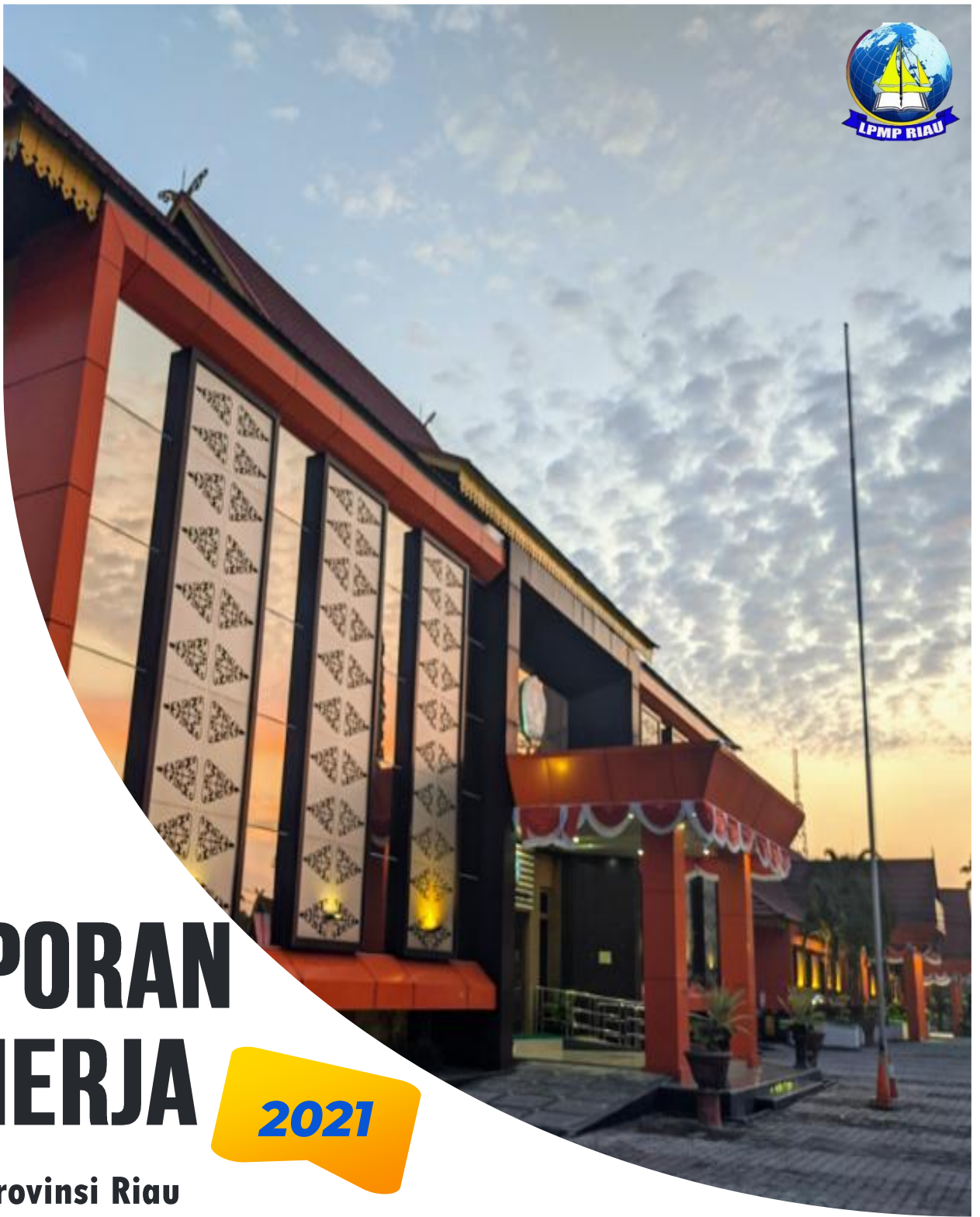




LAPORAN KINERJA

2021

LPMP Provinsi Riau



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

Jalan Gajah Nomor 21 Bambu Kuning, Pekanbaru 28281

Telp. (0761) 26389 – 26390, Faks : (0761) 26389

Laman: lmppriau.kemdikbud.go.id, Posel: sekretariat.lmppriau@kemdikbud.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudi Nurman, S.Pd, M.B.A

NIP : 196403171990031008

Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Riau

dengan ini menyatakan bahwa LPMP Provinsi Riau telah melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja LPMP Provinsi Riau Tahun 2021 untuk selanjutnya diunggah pada laman spasikita.kemdikbud.go.id.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat menunjang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan LPMP Provinsi Riau.

Kepala

Yudi Nurman, S.Pd, M.B.A
NIP. 196403171990031008

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau telah menyelesaikan Laporan Kinerja LPMP Provinsi Riau tahun 2021. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala LPMP Provinsi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsinya menopang tugas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menyelenggarakan Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Laporan Kinerja tahun 2021 ini

menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis LPMP Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021.

LPMP Provinsi Riau sadar masih belum maksimal dalam memperoleh capaian peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPMP Provinsi Riau pada tahun 2021. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan pada tahun mendatang. Untuk penyempurnaan Laporan Kinerja LPMP Provinsi Riau tahun 2021 ini, diharapkan sumbangan saran, pemikiran, dan kritikan yang bersifat membangun sehingga dapat menjadikan Laporan Kinerja LPMP Provinsi Riau tahun 2021 lebih baik dan lebih sempurna, sesuai dengan yang diharapkan.



Kepala,

Yudi Nurman, S.Pd, M.B.A
NIP. 196403171990031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum (1)	
B. Dasar Hukum (2)	
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi (2)	
D. Isu Strategis (4)	
E. Upaya Strategis (4)	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	5
A. Visi, Misi dan Sasaran Strategis (5)	
B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (6)	
C. Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Riau Tahun 2021 (8)	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja (9)	
B. Realisasi Anggaran (27)	
BAB IV PENUTUP	34
Lampiran	35
• Perjanjian Kinerja	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja yang disusun ini bertujuan menggambarkan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh LPMP Provinsi Riau selama tahun 2021 lalu. Sesuai perjanjian kinerja, LPMP Riau memiliki dua sasaran :

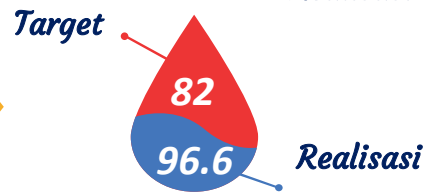
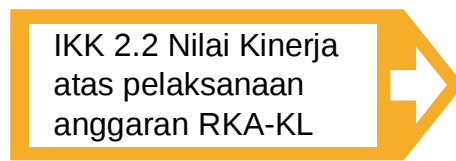
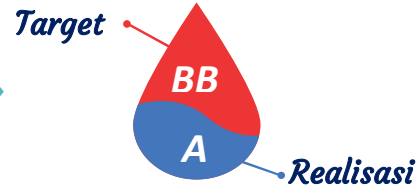
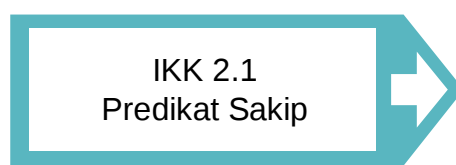
1. **Meningkatkan penjaminan mutu di semua jenjang pendidikan**
2. **Meningkatnya Tata Kelola LPMP**

Ada 5 indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut sebagaimana yang diuraikan lebih pada bagian lain laporan ini. Bagian ini hanya menyajikan ringkasan capaian kinerja selama tahun 2021 lalu.

(disajikan dalam format berbeda)

Capaian IKK LPMP Provinsi Riau Tahun 2021





Realisasi anggaran, pada tahun 2021 mencapai **99,7%** dengan total dana yang terserap mencapai **20,4 miliar**.

Capaian Kelembagaan



Meski demikian, selama tahun 2021 itu tetap ditemui beberapa kendala dalam mewujudkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut, namun hal itu bisa diatasi.

Kendala:

1. Pandemi covid 19

2. Pemanfaatan teknologi internet belum terlalu maksimal dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut:

1. LPMP Provinsi Riau mengembangkan berbagai bentuk aplikasi dalam mengatasi kendala minimnya tatap muka selama pandemi covid 19
2. LPMP Riau selama tahun 2021 ini lalu melalui berbagai forum FGD mengembangkan sejumlah aplikasi pemograman yang bisa mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan, seperti Sigap Mendidik, Semampai dan Simak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

LPMP Provinsi Riau merupakan salah satu UPT Kemendikbud yang Berada di Provinsi Riau dengan tugas Melaksanakan **Penjaminan Mutu, Pengembangan Model, dan Kemitraan** Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Propinsi sesuai dengan **Permendikbud 26 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT kemendikbud**.



Gambaran SDM LPMP Provinsi Riau

2 Pejabat Struktural,
14 JF, 64 JP, dan
33 PPNPN



Beban Kerja LPMP Provinsi Riau



B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
5. PermenPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
7. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Kemendikbud.
9. Rencana Strategis LPMP Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024;
10. Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2021

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas

Melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

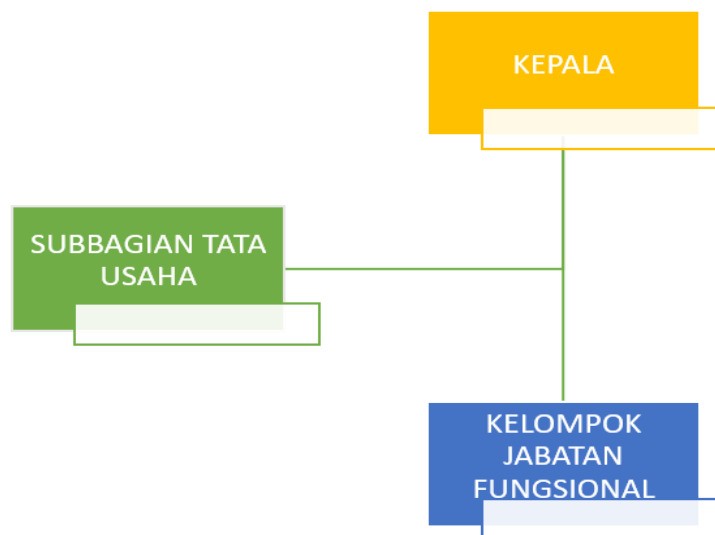
Fungsi

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;

3. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

Struktur Organisasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, LPMP Provinsi Riau memiliki struktur organisasi sesuai dengan **Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020**. Berikut struktur organisasi LPMP Provinsi Riau :



D.Isu Strategis



E. Upaya Strategis

Untuk mengatasi masalah/isu strategis yang ada di Provinsi Riau, LPMP Provinsi Riau melakukan upaya-upaya strategis seperti berikut ini :

1. Pembentukan tim kerja untuk melaksanakan fasilitasi dan kerja sama yang efektif dan efisien dalam peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah terkait pencapaian SNP di Provinsi Riau dalam bentuk bimbingan, pendampingan, vokasi, sosialisasi penguatan literasi dan numerasi serta pelaksanaan Kurikulum pembelajaran dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI bagi sekolah).
2. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi pendidikan sebagai pusat informasi mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis

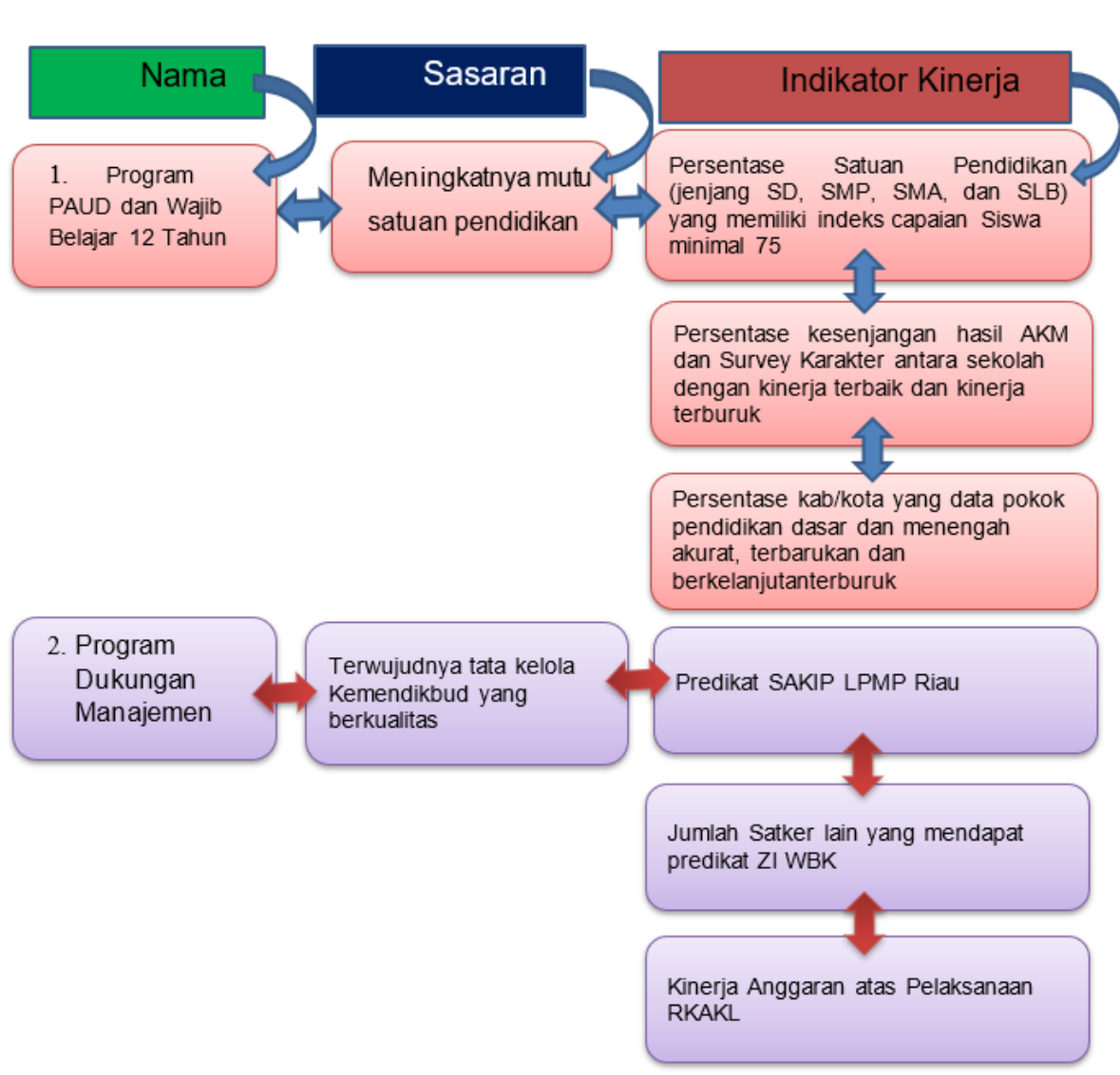
Penentuan Visi LPMP Provinsi Riau berdasarkan pada visi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, visi Kementerian dalam pencapaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045.



B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan LPMP Provinsi Riau, diperlukan sejumlah Program dan Sasaran Program (SP) yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Pada Renstra LPMP Provinsi Riau 2020 – 2024

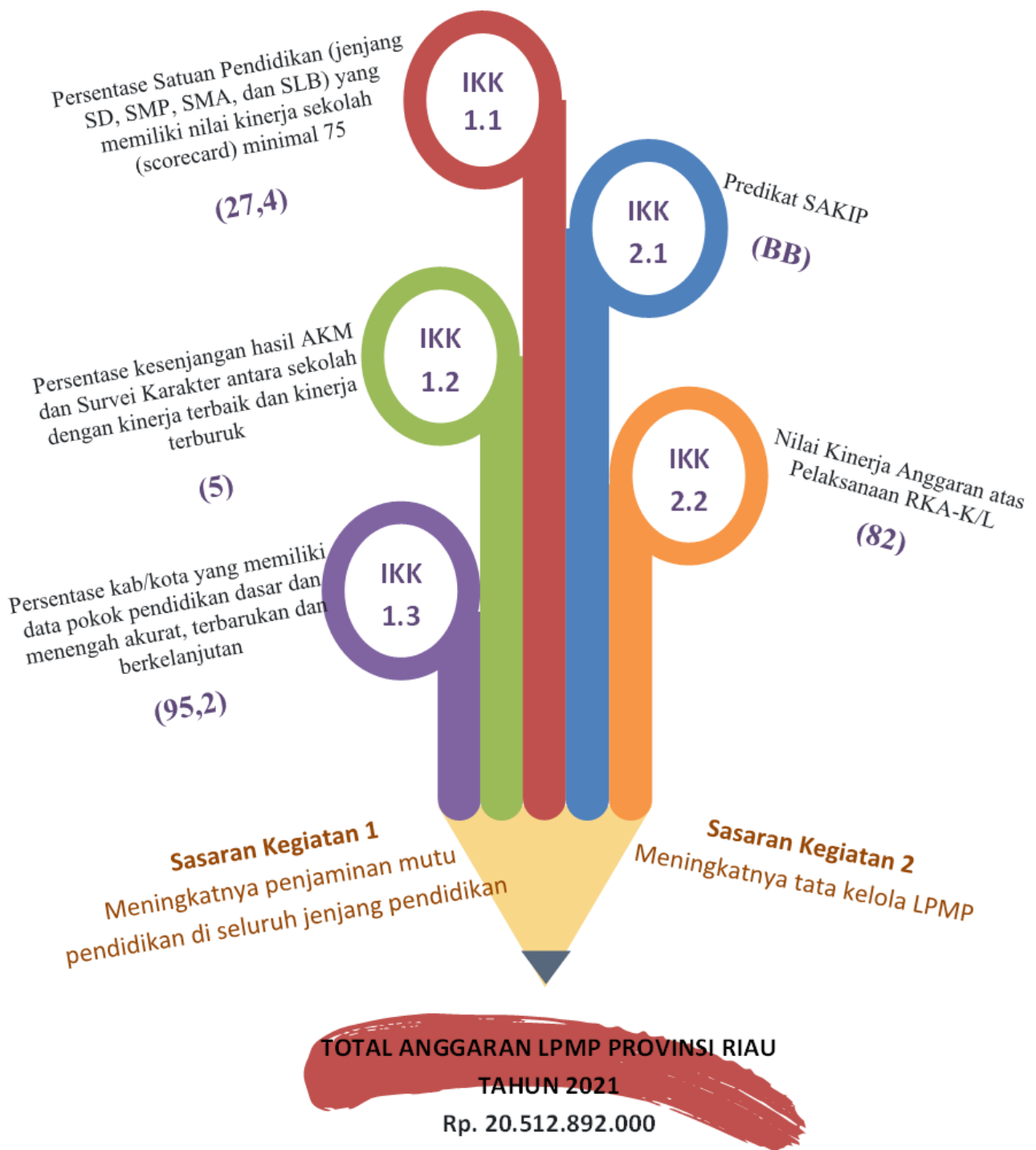


Mendukung keterlaksanaan sasaran program dan indikator kinerja program tersebut, maka disusunlah sasaran strategis, indikator, dan target kinerja seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja LPMP Provinsi Riau
Tahun 2020 – 2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis	Satu an	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah						
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97	104,48	102,98	01,49	00,00
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat	%	92,46	94,34	96,23	98,11	00,00
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18	88,39	90,59	92,80	95,00
SS 2	Meningkatkan tata kelola lembaga yang efektif, transparan, akuntabel dan pelibatan publik dalam peningkatan mutu layanan di Provinsi Riau						
IKSS 2.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 2.2	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	Indeks	81	82	82	83	84

C. Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Riau Tahun 2021



Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja, pada tahun 2021 LPMP Provinsi Riau memiliki dua sasaran dengan lima indikator kinerja. Pada bagian ini akan diinformasikan tingkat ketercapaian yang berhasil diraih pada tahun 2021.

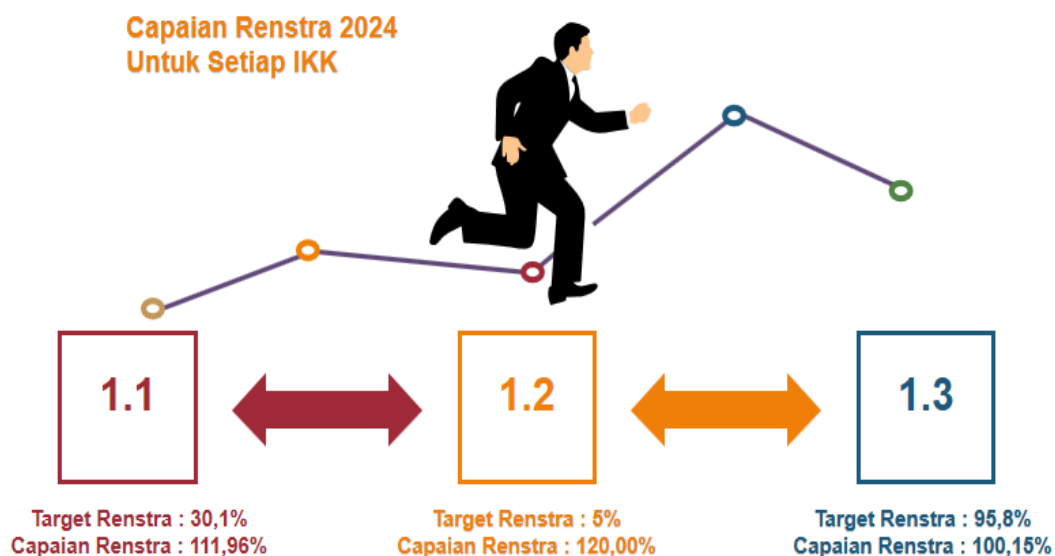
Sasaran kegiatan :

1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
2. Meningkatnya tata kelola LPMP

SKK. 1 Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan berdasarkan Indikator Kerja Kegiatan:

Bagan Capaian Penjaminan Mutu di Seluruh Jenjang Pendidikan





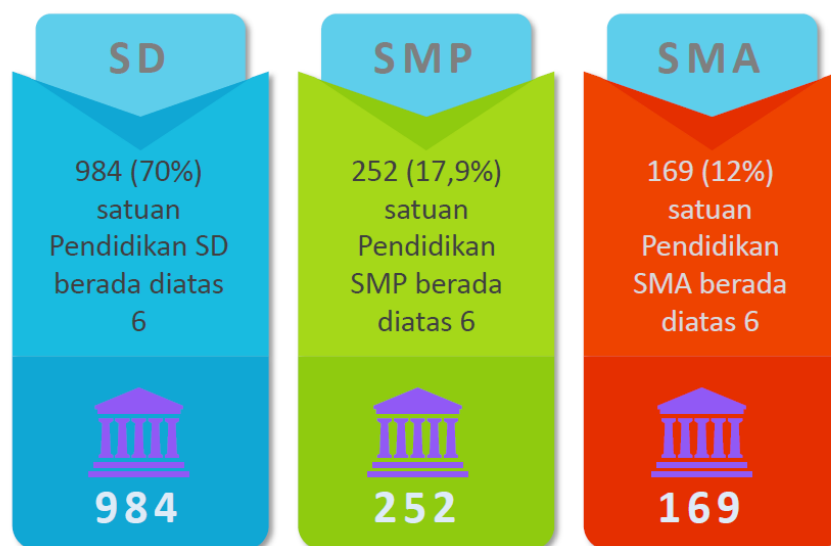
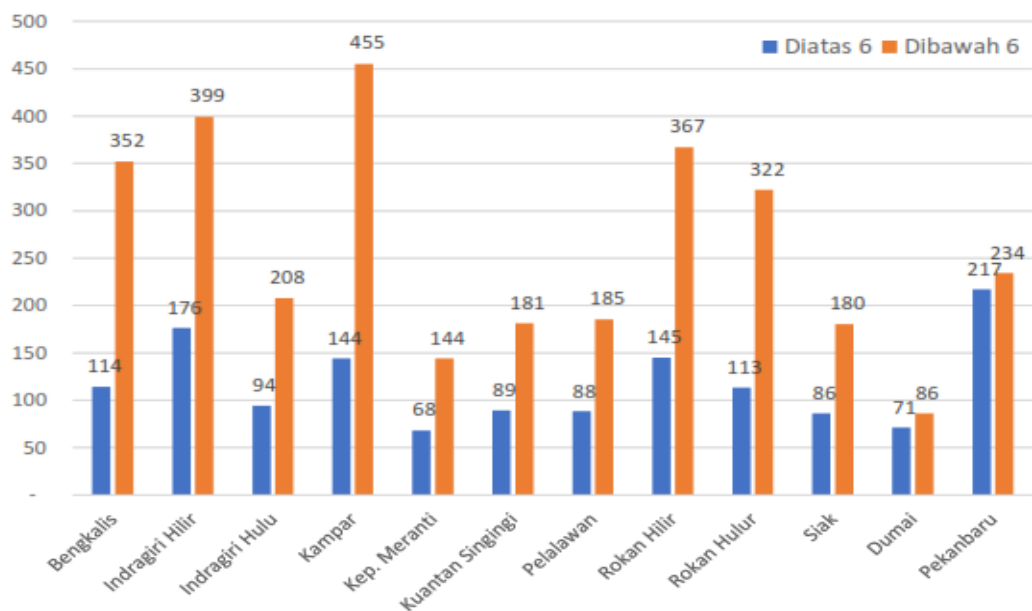
IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 7



Sebaran nilai kinerja sekolah (*score card*) masih dominan berada dibawah 6 yaitu sebanyak 68.9% dan jumlah satuan pendidikan dengan nilai kinerja sekolah berada diatas 6 baru 31,1%. Namun hal ini sebenarnya merupakan sebuah capaian yang baik karena jika dilihat dari kesenjangan nilai AKM dan survey karakter, Provinsi Riau memiliki rerata nilai 2,39%. Artinya nilai kesenjangan kecil.

Sekolah Yang Terpetakan Mutunya

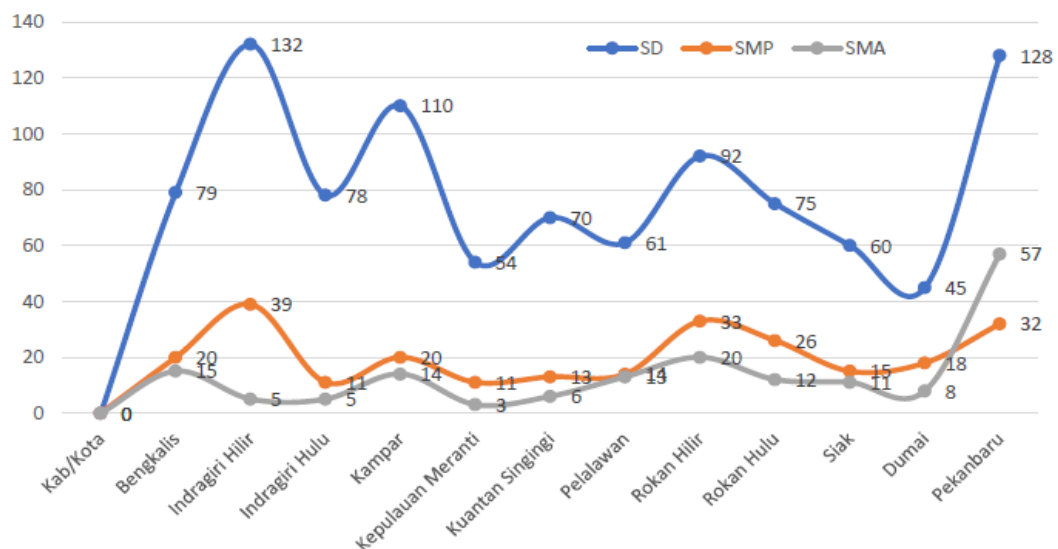
Kota Pekanbaru memiliki persentase jumlah satuan pendidikan terbanyak yang mencapai nilai kinerja diatas 75 yaitu 217 sekolah atau 48,1%. Sementara itu kabupaten Kepulauan Meranti menjadi kabupaten/kota dengan persentase jumlah satuan pendidikan terendah yang mencapai nilai kinerja diatas 75 yaitu sebanyak 68 sekolah atau 32,1%.



Jenjang SD dengan persentase jumlah satuan pendidikan yang mencapai nilai kinerja diatas 6 adalah Kab. Indragiri Hilir dengan jumlah sekolah 132 atau 75,0%. Jenjang SMP dengan persentase jumlah satuan pendidikan yang mencapai nilai kinerja diatas 6 adalah Kab. Indragiri Hilir dengan jumlah sekolah 39 atau 22,2%. Adapun jenjang SMA dengan persentase jumlah satuan pendidikan yang mencapai nilai kinerja diatas 6 juga diraih oleh Kota Pekanbaru dengan jumlah sekolah 57 atau 26,3%.



Rekap diatas 6 perjenjang kabupaten/kota



Jumlah satuan pendidikan jenjang SD yang mencapai nilai kinerja diatas 6 paling kecil adalah Kota Dumai dengan jumlah sekolah 45 atau 63,4%. Persentase jumlah satuan pendidikan jenjang SMP yang mencapai nilai kinerja diatas 6 paling kecil adalah Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah 11 sekolah atau 11,7% dan Kabupaten Kep. Meranti dengan jumlah sekolah 11 atau 16,2%. Dan persentase jumlah satuan pendidikan jenjang SMA yang mencapai nilai kinerja diatas 6 paling kecil adalah Kab. Kep. Meranti dengan jumlah sekolah 3 atau 4,4%.

Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP

Satuan pendidikan yang difasilitasi melalui LPMP berdasarkan 8 SNP yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Riau di tahun 2021, diawali dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis Fasilitasi berdasarkan SNP bagi sekolah binaan dan imbas di 12 Kabupaten/Kota yang berjumlah

1.118 sekolah. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan fasilitasi berdasarkan SNP. Total sekolah yang difasilitasi ini sebanyak 1.118 sekolah. Selanjutnya setelah kegiatan pendampingan, dilakukan monitoring dan evaluasi SPMI ke semua sekolah binaan dan 1 sekolah imbasnya. Adapun jumlah sekolah binaan dan imbas sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sekolah Binaan LPMP Provinsi Riau Tahun 2021

No	Kab/Kota	Jenjang			Jumlah
		SD	SMP	SMA	
1	Bengkalis	7	10	2	19
2	Indragiri Hilir	4	9	3	16
3	Indragiri Hulu	13	11	1	25
4	Kampar	11	14	6	31
5	Kepulauan Meranti	9	5	1	15
6	Kuantan Singingi	4	9	0	13
7	Pelalawan	8	4	2	14
8	Rokan Hilir	6	8	5	19
9	Rokan Hulu	9	8	1	18
10	Siak	5	11	3	19
11	Dumai	3	6	0	9
12	Pekanbaru	17	5	3	25
Jumlah		96	100	27	223

Tabel 1.2
Sekolah Imbas LPMP Provinsi Riau Tahun 2021

<i>No</i>	<i>Kab/Kota</i>	<i>Jenjang</i>			<i>Jumlah</i>
		SD	SMP	SMA	
1	Bengkalis	31	43	7	81
2	Indragiri Hilir	13	37	10	60
3	Indragiri Hulu	52	37	4	93
4	Kampar	45	36	20	101
5	Kepulauan Meranti	35	18	4	57
6	Kuantan Singingi	20	40	0	60
7	Pelalawan	36	15	8	59
8	Rokan Hilir	26	35	17	78
9	Rokan Hulu	44	27	3	74
10	Siak	25	52	8	85
11	Dumai	14	20	0	34
12	Pekanbaru	75	25	13	113
	Jumlah	416	385	94	895

Disamping itu dilaksanakan juga kegiatan lain seperti Program Sekolah Penggerak, Sosialisasi Mitigasi Risiko PTM Terbatas dan Edukasi PHBS, Sosialisasi Kemitraan Penunjang PJJ, serta Sosialisasi Penguatan Literasi dan Numerasi. Berikut rincian masing-masing kegiatan.

- a. Bimbingan Teknis Fasilitasi berdasarkan SNP bagi sekolah binaan dan imbas.
Kegiatan ini dilakukan melalui media dalam jejaring dengan memakai aplikasi Zoom Meeting. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 1.064 dari 1.118 yang diundang (95%).
- b. Pendampingan fasilitasi berdasarkan SNP
Sebelum melakukan pendampingan, kegiatan diawali dengan focus group discussion sebanyak 6 kali, untuk merancang pembuatan aplikasi e-SPMI dilengkapi dengan video tutorial, yang nantinya bisa memudahkan sekolah

dalam memahami dan menerapkan SPMI. Pada kegiatan Pendampingan fasilitasi berdasarkan SNP melibatkan sekolah binaan, pengawas pembina dan sekolah imbas. Dalam pendampingan ini, dilakukan penguatan tentang konsep SPMI dan penggunaan aplikasi e-SPMI. Dari 2905 peserta yang diundang, hadir sebanyak 2903 orang (99,93%).

c. Monitoring dan evaluasi SPMI

Kegiatan ini dilakukan pada semua sekolah binaan dan 1 sekolah imbasnya. Dari 446 sekolah sasaran yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi SPMI, terealisasi sebanyak 336 sekolah (98%). Terdapat 10 sekolah yang tidak dimonitoring dan evaluasi SPMI-nya.

d. Sosialisasi Mitigasi Risiko PTM Terbatas dan Edukasi PHBS

Sosialisasi Mitigasi Risiko PTM Terbatas dan Edukasi PHBS dilakukan secara kombinasi moda dalam jejaring dan moda luring (tatap muka) dengan mengundang unsur dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan Dinas Kesehatan. Kegiatan ini diikuti oleh 232 peserta dari 275 yang diundang (84,36%).

e. Sosialisasi Kemitraan Penunjang PJJ

Sosialisasi Kemitraan Penunjang PJJ dilakukan secara kombinasi moda dalam jejaring dan moda luring (tatap muka) dengan mengundang unsur dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Dinas Kominfo dan Dinas PMD. Kegiatan ini diikuti oleh 224 peserta dari 274 yang diundang (81,75%)

f. Sosialisasi Penguatan Literasi dan Numerasi

Kegiatan ini dilakukan secara kombinasi daring dan luring dengan mengundang unsur-unsur dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta pegiat literasi. Kegiatan diikuti oleh 251 Orang peserta dari 274 yang diundang (92%).

g. Program Sekolah Penggerak

Kegiatan yang mendukung program sekolah penggerak meliputi Gebyar Program Sekolah Penggerak di Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau yang dihadiri oleh pemerintah daerah, praktisi pendidikan, kepala sekolah TK, SD, SLB, SMP dan SMA. Dilanjutkan dengan kegiatan coaching klinik untuk PSP Tahap 1 (Dumai, Siak dan Indragiri Hilir) dan PSP Tahap 2 (Pelalawan, Kuantan Singingi dan Rokan Hilir). Program Sekolah Penggerak ini ditutup dengan kegiatan Pleno Penentuan Kelulusan calon peserta PSP Tahap 2 (Dumai, Siak, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi dan Rokan Hilir).

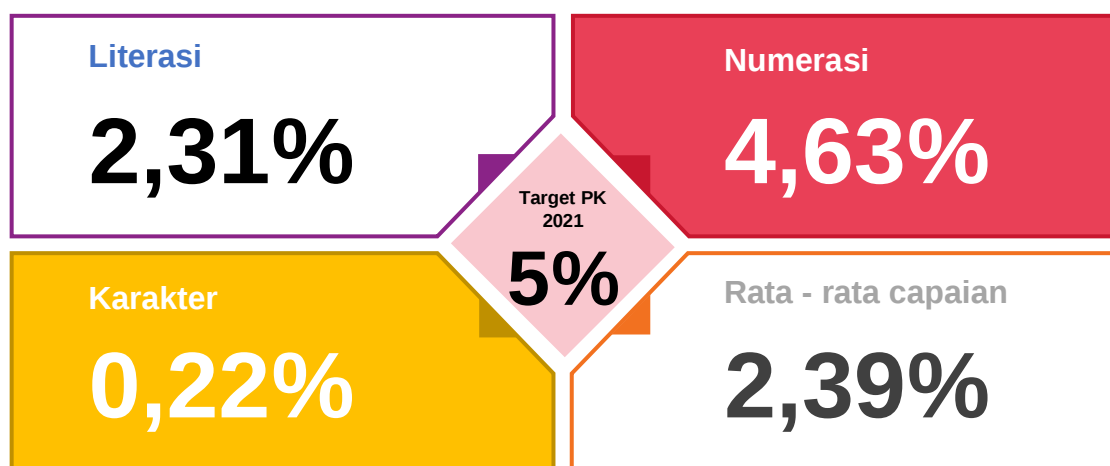
IKK 1.2. : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk

Assesment kompetensi minimal (AKM) adalah salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur dari dua kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat, yakni literasi dan numerasi

"Literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan, dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. Dua hal ini yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi minimum. Jadi bukan berdasarkan mata pelajaran dan penguasaan materi. Ini kompetensi minimum atau kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar," tutur Mendikbud dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta.

Sedangkan terkait survey karakter dilakukan untuk mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas – asas Pancasila oleh murid Indonesia, misalnya bagaimana implementasi gotong royong, apakah kebahagiaan anak di sekolah sudah mapan. apakah masih ada bullying. Survei ini akan menjadi suatu panduan dan tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik atau feedback ke sekolah agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang membuat siswa lebih bahagia dan lebih kuat dalam memahami dan menerapkan asas Pancasila.

Capaian IKK 1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk



Target kinerja LPMP Provinsi Riau untuk persentase kesenjangan hasil AKM dan survey karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada tahun 2021 berdasarkan perjanjian kinerja kepala LPMP adalah sebesar 5%. Capaian LPMP Provinsi Riau untuk target ini adalah 2.39% dengan persentase kesenjangan literasi 2.31%, numerasi 4.63% dan survey karakter 0.22%.

Target PK tahun 2021 telah tercapai, bahkan melampaui target, yakni persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk hanya 2,39% (merupakan rata-rata dari kesenjangan Literasi, Numerasi dan Karakter). Adapun kegiatan pendukung yang diselenggarakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. FGD Penambahan Fitur Aplikasi SEMAMPAI tanggal 16 s.d 17 September 2021;
2. Bimbingan Teknis Supervisi tanggal 30 September s.d 1 Oktober 2021;
3. Monitoring Pelaksanaan ANBK Tahun 2021 Jenjang SMP tanggal 3 s.d 5 Oktober 2021 di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;
4. Monitoring dan Evaluasi Supervisi ke Satuan Pendidikan Tahun 2021 tanggal 7 s.d 9 Oktober 2021, 17 s.d 19 Oktober 2021 dan 21 s.d 23 Oktober 2021 di 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
5. Monitoring Pelaksanaan ANBK SD Tahun 2021 di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tanggal 15 s.d 19 November 2021;
6. FGD Pengolahan Format Data Hasil Supervisi tanggal 19 s.d 20 November 2021;
7. FGD Pengolahan Penyusunan Format Infografis Hasil Supervisi Mutu tanggal 16 s.d 17 Desember 2021;
8. Penyusunan Template Profil Pendidikan tanggal 24 Desember 2021;
9. Penyusunan dan Analisis Profil Mutu Pendidikan tanggal 26 s.d 27 Desember 2021.

IKK 1.3 : Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan



Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2021 per jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA) dapat dilihat pada tabel berikut:

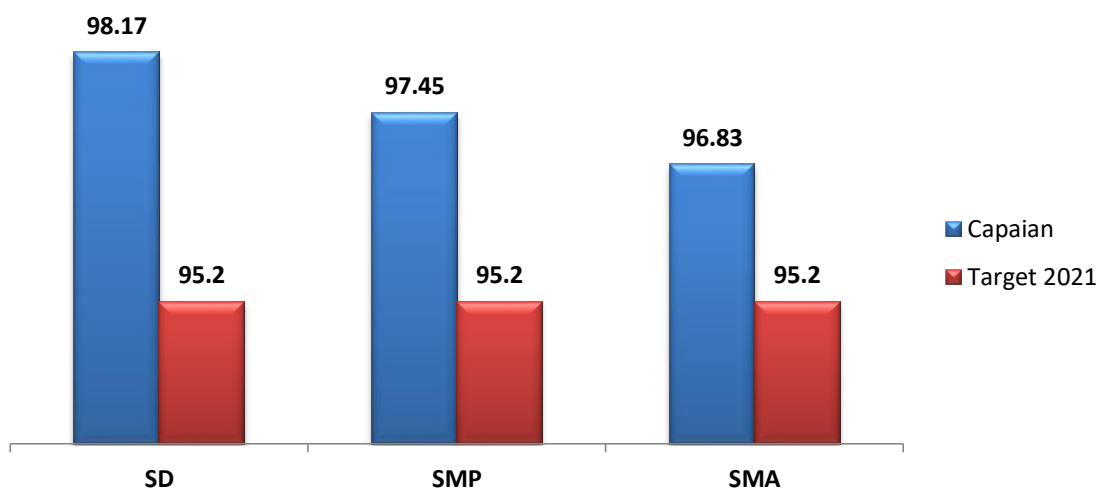
Tabel 1: Persentase Capaian Rapor Dapodik Dasmen Provinsi Riau Tahun 2021
Jenjang SD, SMP dan SMA

Jenjang	Akurat	Mutakhir	Berkelanjutan	Total	Target 2021
SD	96,45	99,24	98,82	98,17	95,20
SMP	96,94	98,55	96,86	97,45	95,20
SMA	96,51	97,65	97,66	96,83	95,20

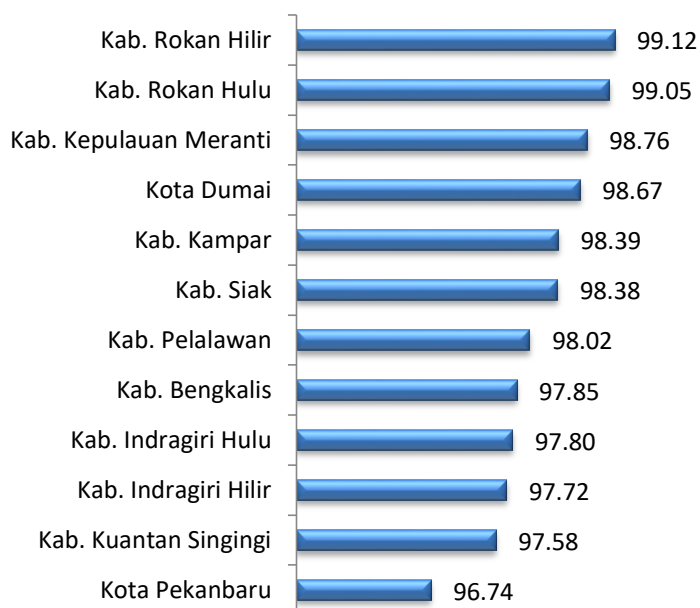
Sumber : <https://dapomart.kemdikbud.go.id/>

Dari tabel diatas, capaian Rapor Data Pokok Pendidikan Provinsi Tahun 2021 telah melampaui target 2021, dengan rincian selisih capaian SD sebesar 2,97%, SMP sebesar 2,25% dan SMA sebesar 1,63%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik perbandingan dibawah ini :

Grafik 1: Perbandingan Target dan Capaian Rapor Dapodik Dasmen
Provinsi Riau Tahun 2021 Jenjang SD, SMP dan SMA

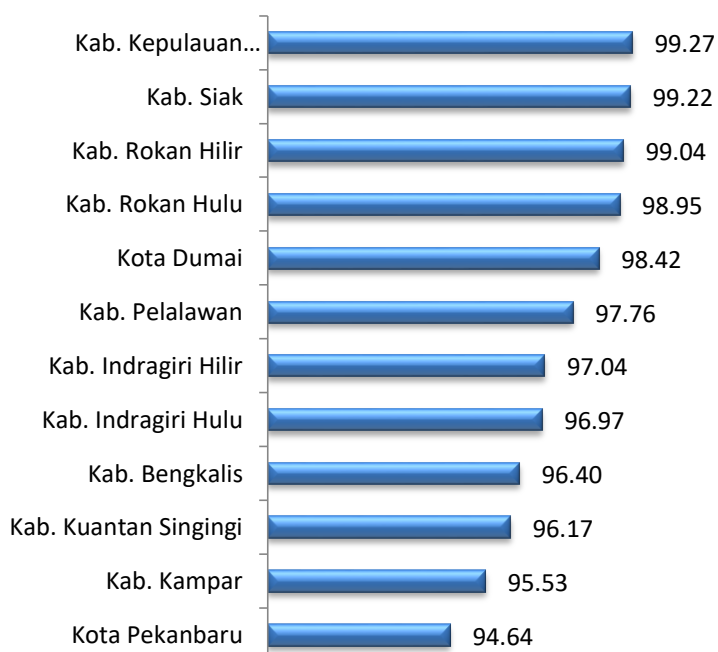


Grafik 2. Capaian Rapor Dapodik SD Per Kab/Kota Tahun 2021



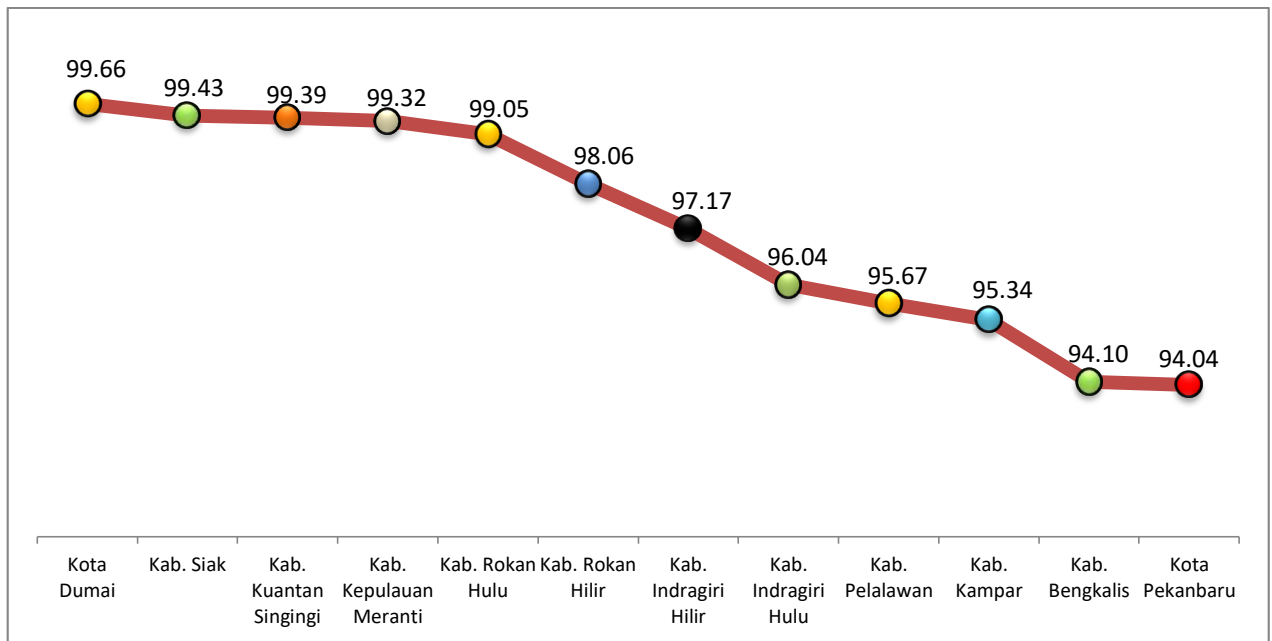
Berdasarkan jabaran data pada tabel 2, capaian rapor Dapodik jenjang SD tertinggi di Provinsi Riau diperoleh Kabupaten Rokan Hilir dengan capaian 99,12%. Sedangkan kota Pekanbaru dengan capaian terendah dengan persentase capaian sebesar 96,74%.

Grafik 3. Capaian Rapor Dapodik SMP Per Kab/Kota Tahun 2021



Berdasarkan jabaran data pada tabel 3 diatas, capaian rapor Dapodik jenjang SMP tertinggi di Provinsi Riau diperoleh Kabupaten Kep. Meranti dengan capaian 99,27%. Sedangkan kota Pekanbaru dengan capaian terendah dengan persentase capaian sebesar 94,64%.

Grafik 4. Capaian Rapor Dapodik SMA Per Kab/Kota Tahun 2021

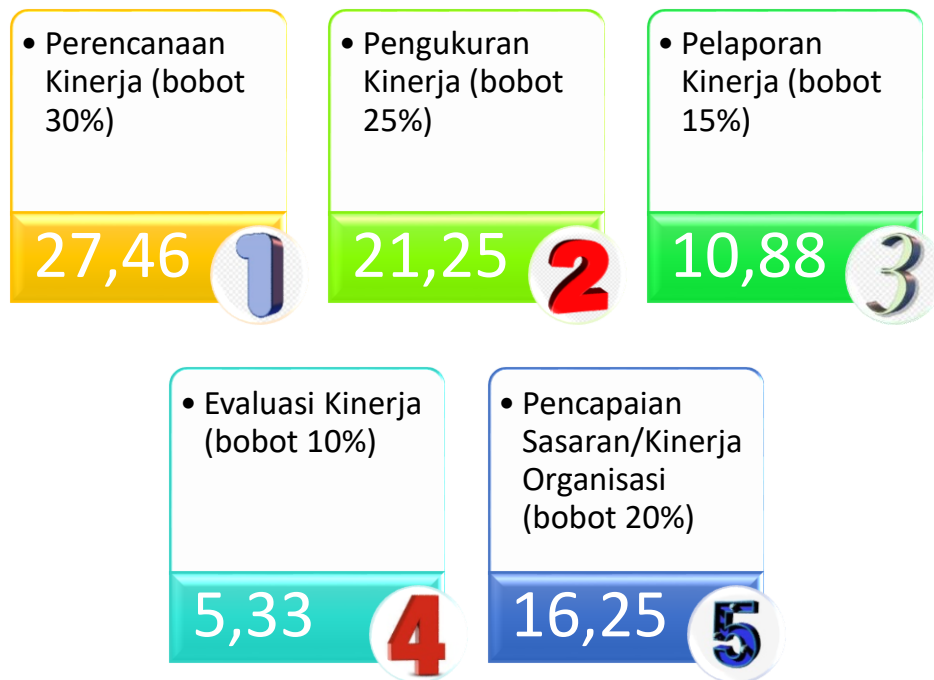


Berdasarkan jabaran data pada tabel 4 diatas, capaian rapor Dapodik jenjang SMA tertinggi di Provinsi Riau diperoleh Kota Dumai dengan capaian 99,66%. Sedangkan kota Pekanbaru dengan capaian terendah dengan persentase capaian sebesar 94,04%.

SKK 2 : Meningkatnya Tata Kelola LPMP

IKK 2.1 : Predikat Sakip

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP LPMP Provinsi Riau Tahun 2021 berhasil memperoleh predikat A dengan nilai 81,17. Predikat A Diperoleh dari rincian nilai sebagai berikut.



Peningkatan capaian nilai SAKIP LPMP Provinsi Riau Tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan tata kelola lembaga ke arah yang lebih baik. Capaian nilai ini telah mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga 2021.



Adapun perbandingan antara target tahunan yang disajikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan realisasi capaian tahun 2021 serta target Rencana Strategis (Renstra) LPMP Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra 2024
BB	A	BB

Selain ditunjukkan dengan peningkatan nilai SAKIP, tata kelola yang mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik juga ditunjukkan dengan sejumlah prestasi yang diperoleh LPMP Provinsi Riau sebagai berikut.



PENGHARGAAN YANG DIRAIH LPMP PROVINSI RIAU



PENGELOLA ULT TERBAIK DI UPT DAERAH



ULT DI UPT DAERAH DENGAN PREDIKAT PELAYANAN PRIMA

PENGHARGAAN YANG DIRAIH LPMP PROVINSI RIAU

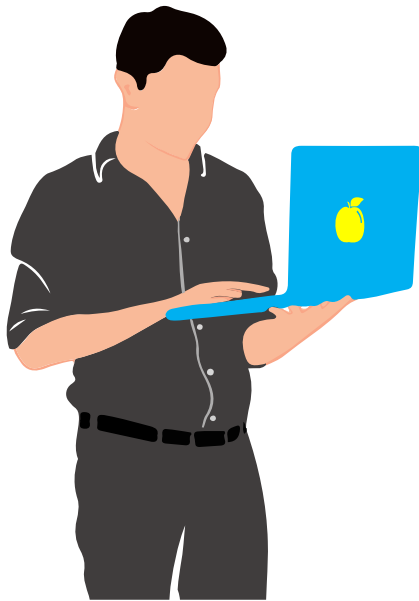


FASILITAS ISOLASI TERPUSAT PASIEN COVID-19 TERBAIK TAHUN 2020 DARI DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

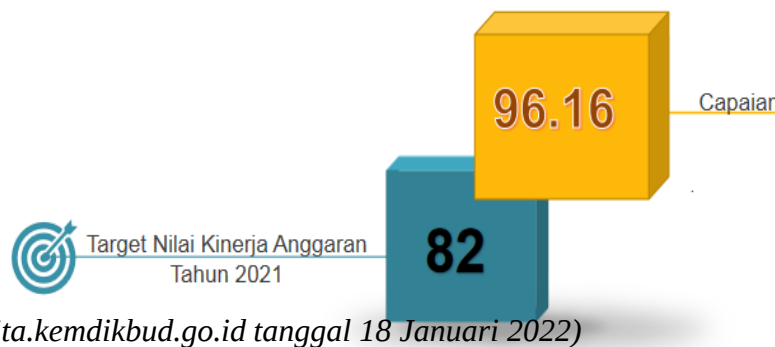


FASILITAS ISOLASI TERPUSAT PASIEN COVID-19 TERBAIK SEMESTER I TAHUN 2021 DARI DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

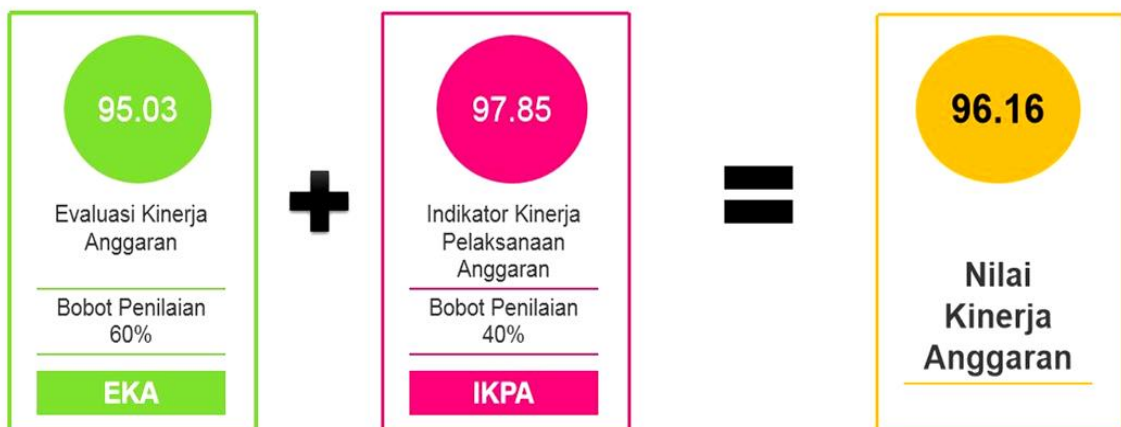
IKK. 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL



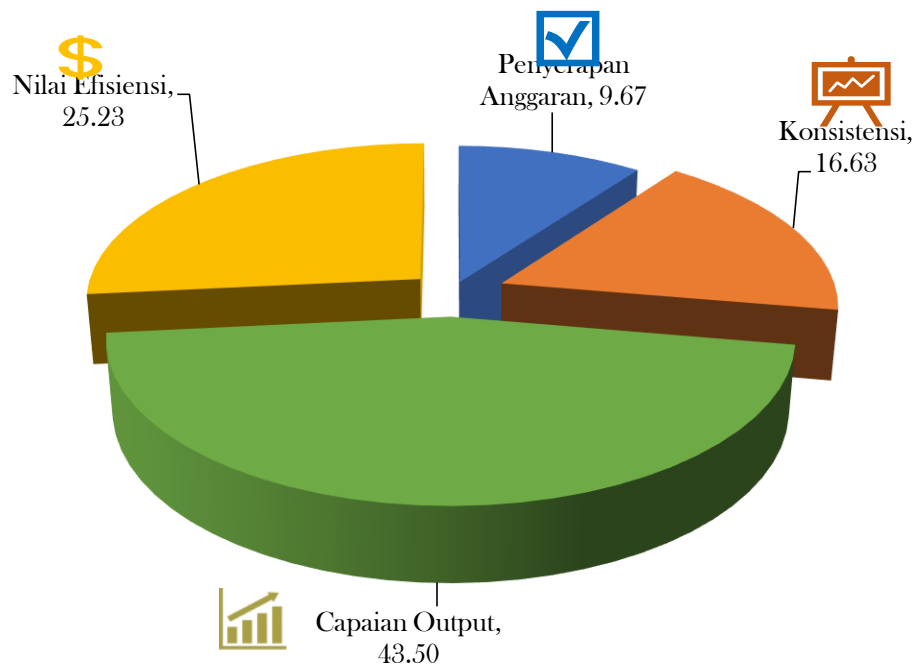
Menurut Perjanjian Kinerja Kepala pada IKK 2.2 yaitu tentang Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA/KL, pada pelaksanaan anggaran tahun 2021 ini LPMP Provinsi Riau telah meraih nilai yang **jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan**.



Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021



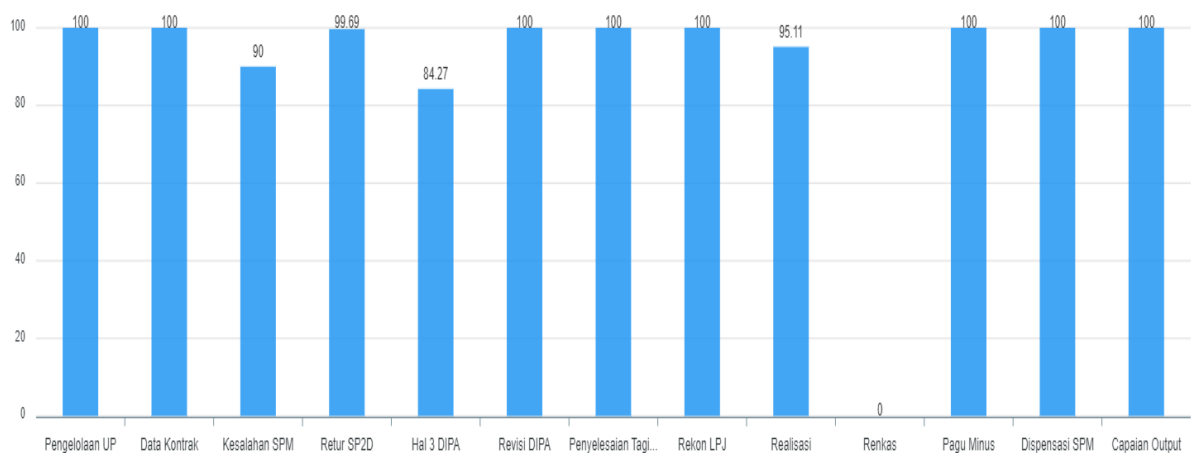
(sumber data: spasikita.kemdikbud.go.id tanggal 18 Januari 2022)



Rincian capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat

Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Revisi DIPA	100.00	5	5.00
Deviasi Halaman III DIPA	84.27	5	4.21
Penyampaian Data Kontrak	100.00	5	5.00
Ketertiban Pengelolaan Uang Persediaan	100.00	10	10.00
LPJ Bendahara	100.00	8	8.00
Dispensasi SPM	100.00	5	5.00
Realisasi Anggaran	95.11	15	14.27
Penyelesaian Tagihan	100.00	10	10.00
Konfirmasi Capaian Output	100.00	17	17.00
Retur SP2D	99.69	5	4.98
Perencanaan Kas	0.00	0	0.00
Kesalahan SPM	90.00	5	4.50
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		97.85	

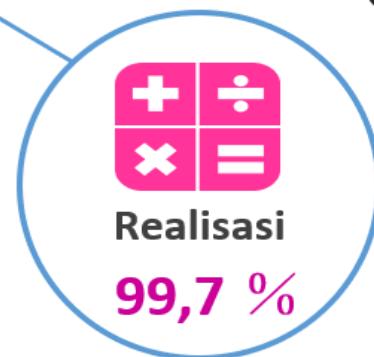
(sumber data: spanint.kemenkeu.go.id)



B. Realisasi Anggaran

Capaian Realisasi Anggaran

Jumlah realisasi anggaran belanja pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar **Rp20.450.564.579,00** dari alokasi anggaran sebesar **Rp20.512.892.000,00**



Rincian capaian realisasi anggaran dari setiap output disajikan pada gambar berikut:

Anggaran Kinerja

Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya



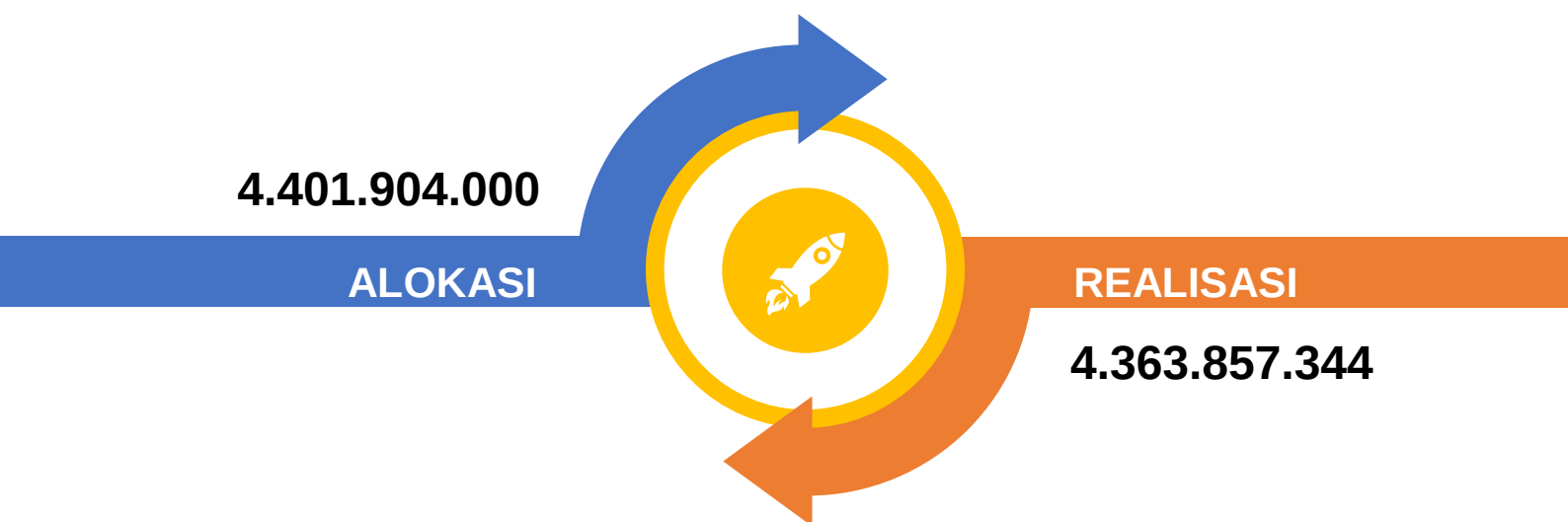
Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk



Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75



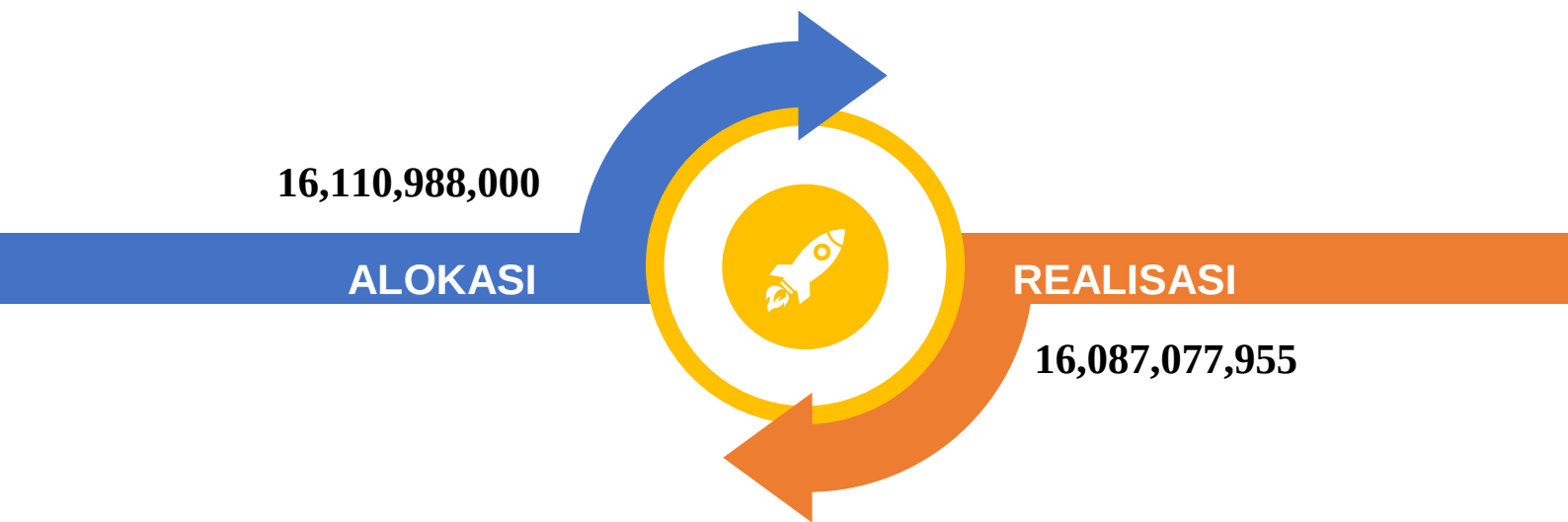
Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan



Dukungan Manajemen

Prosentase Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen





Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada bagan berikut



Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Grafik Realisasi Belanja Pegawai LPMP Provinsi Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

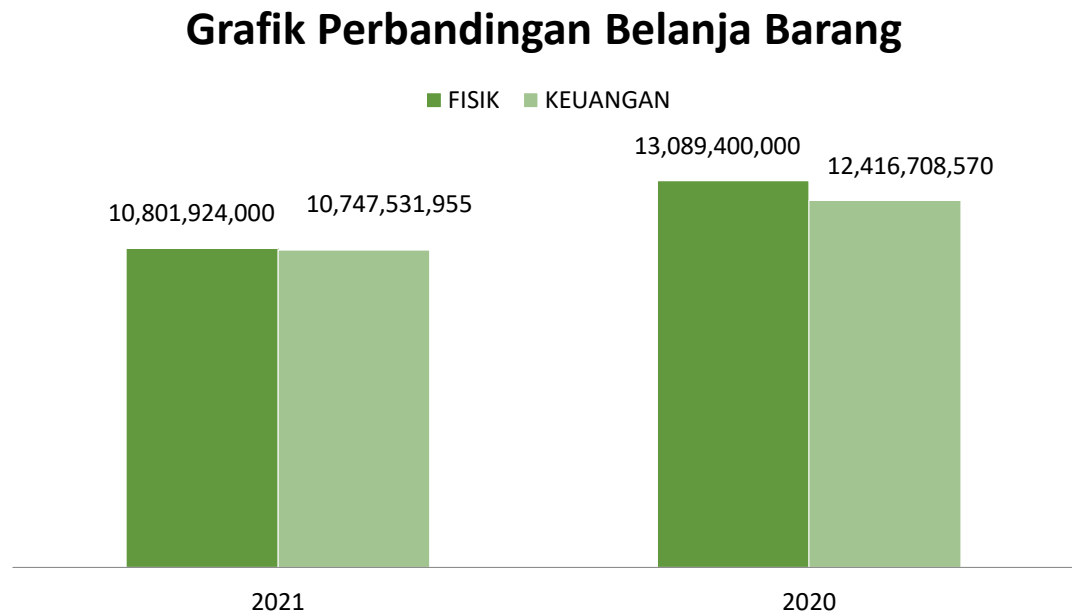


Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2021 mengalami peningkatan baik dalam jumlah dan dalam persentase daya serap realisasi anggaran jika dibandingkan tahun anggaran 2020.

Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Grafik Realisasi Belanja Barang LPMP Provinsi Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

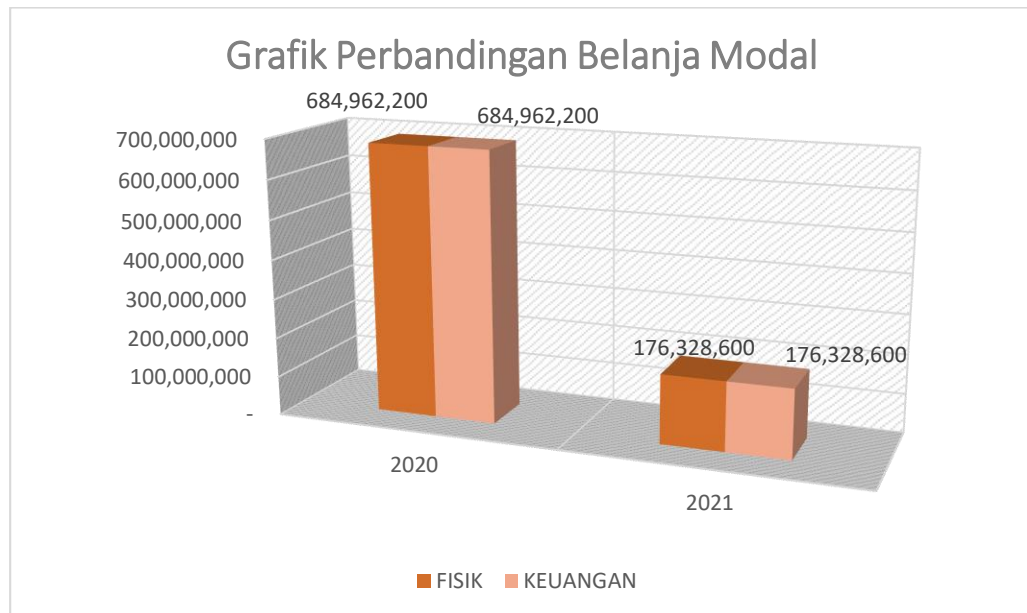


Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa belanja barang mengalami penurunan jika dilihat dari jumlah anggaran yang telah direalisasikan namun jika dilihat dari persentase daya serap anggaran mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020.

Belanja Modal

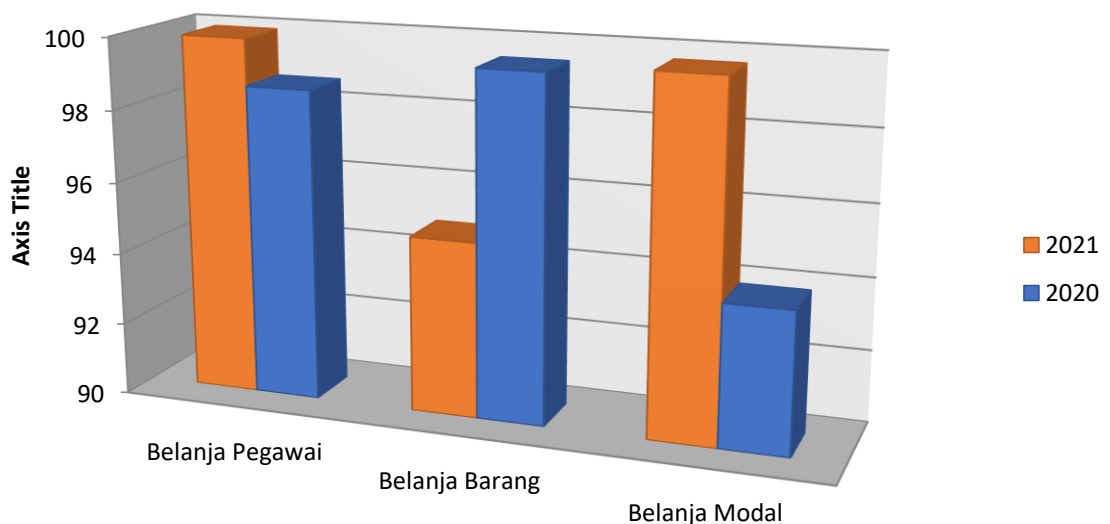
Belanja modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Grafik Realisasi Belanja Modal LPMP Provinsi Riau dapat digambarkan sebagai berikut :

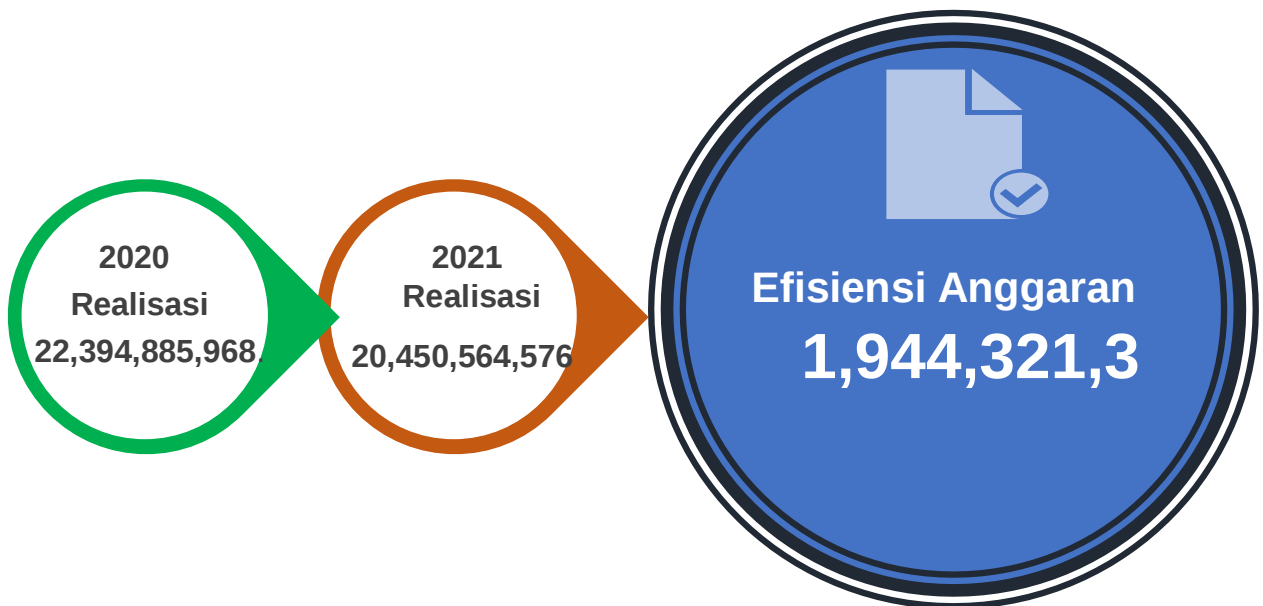


Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah realisasi anggaran belanja modal mengalami penurunan secara jumlah maupun secara persentase, dan telah terlaksana 100% pada tahun 2021 dan tahun 2020.

Perbandingan Prosentase Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2020 - 2021



Efisiensi Anggaran



Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari perubahan metode pelaksanaan kegiatan, yaitu dari metode tatap muka secara langsung menjadi jarak jauh dengan strategi video conference, hal ini secara langsung dapat mengefisiensi anggaran dalam hal perjalanan dinas, biaya ATK, biaya konsumsi dan biaya lainnya pendukung kegiatan jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka. Efisiensi juga diperoleh dengan adanya perubahan pelayanan yang diberikan, yaitu yang semula pelayanan secara manual diubah dengan memanfaatkan sistem informasi melalui beberapa aplikasi pendukung kinerja LPMP Provinsi Riau.

BAB IV PENUTUP

LPMP Provinsi Riau pada tahun 2021 lalu berhasil melampaui target yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja yang disepakati. Kenyataan itu terlihat dari tingkat realisasi capaian dibandingkan ditargetkan.

No	IKK	Target	Realiasi	%
<i>Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di semua jenjang pendidikan</i>				
1	IKK 1.1: Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	27,4		
2	IKK 1.2 : kesenjangan hasil AKM dan survey karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5 %	2.39 %	209%
3	IKK 1.3 : Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95,20%	97,48%	102%
<i>Meningkatnya tata kelolah LPMP</i>				
1	IKK 2.1 : Predikat Sakip	BB	A	
2	IKK 2.2: Nilai Kinerja atas pelaksanaan anggaran RKA-KL	82	96,6	

Selama periode tahun 2021 tersebut total anggaran yang terserap melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan mencapai 99,7 persen atau senilai 20,450 miliar dari 20,892 miliar yang dialokasikan, dengan tingkat efisiensi mencapai 1,994,32.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan, masih terdapat beberapa poin penting yang perlu menjadi catatan pada tahun 2021 lalu : Adanya pandemi menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa berjalan dengan normal dan baik, seperti tidak diperbolehkannya tatap muka, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan dan realisasi anggaran. .

Selain itu, untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi LPMP Riau masih perlu melakukan beberapa hal penting, antara lain: LPMP Riau dirasa lebih perlu untuk mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama optimalisasi teknologi internet.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA LPMP
PROVINSI RIAU
DENGAN DIRJEN
PAUD, DIKDAS DAN
DIKMEN

REVISI PERJANJIAN
KINERJA KEPALA
LPMP PROVINSI RIAU
DENGAN DIRJEN
PAUD, DIKDAS DAN
DIKMEN

LAPORAN B19

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA LPMP
PROVINSI RIAU
DENGAN DIRJEN
PAUD, DIKDAS DAN
DIKMEN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala LPMP Provinsi Riau
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A

Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Riau

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Januari 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Kepala LPMP Provinsi Riau



Jumeri, S.TP.,M.Si.



Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	27,4
		[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5
		[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95,2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	BB
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	82

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 18.791.172.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 6.842.023.000
		TOTAL	Rp. 25.633.195.000

Jakarta, 29 Januari 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Kepala LPMP Provinsi Riau



Jumeri, S.TP., M.Si.



Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A

REVISI PERJANJIAN
KINERJA KEPALA
LPMP PROVINSI RIAU
DENGAN DIRJEN
PAUD, DIKDAS DAN
DIKMEN



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala LPMP Provinsi Riau
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A

Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Riau

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Pekanbaru, 29 November 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Kepala LPMP Provinsi Riau



Jumeri, S.TP.,M.Si.

Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	27.4
		[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5
		[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95.2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	BB
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	82

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 4.401.904.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 16.110.988.000
		TOTAL	Rp. 20.512.892.000

Pekanbaru, 29 November 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Kepala LPMP Provinsi Riau



Jumeri, S.TP., M.Si.

Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A

LAPORAN B19

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
Bulan: Januari 2021 - Desember 2021

Format : B.19
 Nama Satker : LPMP RIAU

Dana DIPA : Rp 20.512.892.000
 Realisasi : Rp 20.450.935.299
 Keuangan : 99,70%
 Fisik :

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total				Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran		
419526	LPMP RIAU					9.534.239.000	9.527.074.744	10.801.924.000	10.747.531.955	176.729.000	176.328.600	0	0	20.512.892.000	20.450.935.299	99,70	61.956.701	0	1. Satker
03	DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH					9.534.239.000	9.527.074.744	10.801.924.000	10.747.531.955	176.729.000	176.328.600	0	0	20.512.892.000	20.450.935.299	99,70	61.956.701	0	2. Unit
03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran					0	0	4.401.904.000	4.363.857.344	0	0	0	0	4.401.904.000	4.363.857.344	99,14	38.046.656	0	3. Program
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas					0	0	4.401.904.000	4.363.857.344	0	0	0	0	4.401.904.000	4.363.857.344	99,14	38.046.656	0	4. Kegiatan
6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga	5.588	5.588	100,00	0	0	4.401.904.000	4.363.857.344	0	0	0	0	4.401.904.000	4.363.857.344	99,14	38.046.656	0	5. Output
6397.QDB.750	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	5.588	5.588	100,00	0	0	4.401.904.000	4.363.857.344	0	0	0	0	4.401.904.000	4.363.857.344	99,14	38.046.656	0	6. Sub Output
051	Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu					0	0	15.730.000	14.355.000	0	0	0	0	15.730.000	14.355.000	91,26	1.375.000	0	7. Komponen
051.A	Penyusunan Template Profil Mutu Pendidikan					0	0	15.730.000	14.355.000	0	0	0	0	15.730.000	14.355.000	91,26	1.375.000	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0,00	400	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	15.330.000	14.355.000	0	0	0	0	15.330.000	14.355.000	93,64	975	0	9. Akun
052	Analisis Data Mutu					0	0	34.696.000	33.812.000	0	0	0	0	34.696.000	33.812.000	97,45	884	0	7. Komponen
052.A	Penyusunan dan Analisis Profil Mutu Pendidikan					0	0	34.696.000	33.812.000	0	0	0	0	34.696.000	33.812.000	97,45	884	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	5.206.000	5.102.000	0	0	0	0	5.206.000	5.102.000	98,00	104	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	29.490.000	28.710.000	0	0	0	0	29.490.000	28.710.000	97,36	780	0	9. Akun
055	Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	674.442.000	674.110.751	0	0	0	0	674.442.000	674.110.751	99,95	331.249	0	7. Komponen
055.A	Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	374.460.000	374.134.009	0	0	0	0	374.460.000	374.134.009	99,91	325.991	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	52.820.000	52.819.400	0	0	0	0	52.820.000	52.819.400	100,00	600	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	36.200.000	35.874.609	0	0	0	0	36.200.000	35.874.609	99,10	325.391	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000	5.200.000	100,00	0	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0	0	280.240.000	280.240.000	0	0	0	0	280.240.000	280.240.000	100,00	0	0	9. Akun
055.B	Gebyar Progra m Sekolah Penggerak					0	0	299.982.000	299.976.742	0	0	0	0	299.982.000	299.976.742	100,00	5.258	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	68.527.000	68.526.742	0	0	0	0	68.527.000	68.526.742	100,00	258	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	23.500.000	23.500.000	0	0	0	0	23.500.000	23.500.000	100,00	0	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	33.400.000	33.400.000	0	0	0	0	33.400.000	33.400.000	100,00	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	14.600.000	14.600.000	0	0	0	0	14.600.000	14.600.000	100,00	0	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0	0	159.955.000	159.950.000	0	0	0	0	159.955.000	159.950.000	100,00	5	0	9. Akun
062	Bimbingan Teknis Fasilitasi Berdasarkan SNP					0	0	122.504.000	122.484.000	0	0	0	0	122.504.000	122.484.000	99,98	20	0	7. Komponen

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total				Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran		
062.A	Bimbingan Teknis Fasilitasi Berdasarkan SNP					0	0	122.504.000	122.484.000	0	0	0	0	122.504.000	122.484.000	99,98	20	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	12.312.000	12.292.000	0	0	0	0	12.312.000	12.292.000	99,84	20	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	109.592.000	109.592.000	0	0	0	0	109.592.000	109.592.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	600	600	0	0	0	0	600	600	100,00	0	0	9. Akun
063	Pendampingan Fasilitasi Berdasarkan SNP					0	0	2.566.228.000	2.535.331.447	0	0	0	0	2.566.228.000	2.535.331.447	98,80	30.896.553	0	7. Komponen
063.A	Pendampingan Fasilitasi Berdasarkan SNP					0	0	870.442.000	845.189.996	0	0	0	0	870.442.000	845.189.996	97,10	25.252.004	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	237.382.000	237.085.520	0	0	0	0	237.382.000	237.085.520	99,88	296.48	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	7.436.000	7.436.000	0	0	0	0	7.436.000	7.436.000	100,00	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	75.600.000	75.600.000	0	0	0	0	75.600.000	75.600.000	100,00	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	74.574.000	49.620.476	0	0	0	0	74.574.000	49.620.476	66,54	24.953.524	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000	100,00	0	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0	0	467.350.000	467.348.000	0	0	0	0	467.350.000	467.348.000	100,00	2	0	9. Akun
063.B	Koordinasi Kesiapan Pendampingan Kebijakan Kemendikbud					0	0	822.986.000	822.852.450	0	0	0	0	822.986.000	822.852.450	99,98	133.55	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	48.764.000	48.741.450	0	0	0	0	48.764.000	48.741.450	99,95	22.55	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000	100,00	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	631.770.000	631.765.000	0	0	0	0	631.770.000	631.765.000	100,00	5	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	16.610.000	16.505.000	0	0	0	0	16.610.000	16.505.000	99,37	105	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0	0	119.542.000	119.541.000	0	0	0	0	119.542.000	119.541.000	100,00	1	0	9. Akun
063.C	Pendampingan Kebijakan Kemendikbud ke Pemerintah Daerah					0	0	477.602.000	472.187.300	0	0	0	0	477.602.000	472.187.300	98,87	5.414.700	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	55.213.000	50.312.300	0	0	0	0	55.213.000	50.312.300	91,12	4.900.700	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	900	900	0	0	0	0	900	900	100,00	0	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000	100,00	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	8.900.000	8.900.000	0	0	0	0	8.900.000	8.900.000	100,00	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	138.511.000	138.000.000	0	0	0	0	138.511.000	138.000.000	99,63	511	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0	0	267.478.000	267.475.000	0	0	0	0	267.478.000	267.475.000	100,00	3	0	9. Akun
063.E	Pelaksanaan Kemitraan dan implementasi program Kerjasama					0	0	395.198.000	395.101.701	0	0	0	0	395.198.000	395.101.701	99,98	96.299	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	15.789.000	15.788.640	0	0	0	0	15.789.000	15.788.640	100,00	360	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	7.050.000	7.050.000	0	0	0	0	7.050.000	7.050.000	100,00	0	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	33.763.000	33.668.000	0	0	0	0	33.763.000	33.668.000	99,72	95	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	10.800.000	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000	10.800.000	100,00	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	258.044.000	258.044.000	0	0	0	0	258.044.000	258.044.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	69.752.000	69.751.061	0	0	0	0	69.752.000	69.751.061	100,00	939	0	9. Akun
065	Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Berdasarkan SNP					0	0	238.560.000	237.982.500	0	0	0	0	238.560.000	237.982.500	99,76	577.5	0	7. Komponen
065.A	Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Berdasarkan SNP					0	0	238.560.000	237.982.500	0	0	0	0	238.560.000	237.982.500	99,76	577.5	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	6.570.000	6.002.500	0	0	0	0	6.570.000	6.002.500	91,36	567.5	0	9. Akun

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total				Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	231.990.000	231.980.000	0	0	0	0	231.990.000	231.980.000	100,00	10	0	9. Akun
071	Penyusunan Program Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	119.484.000	119.417.950	0	0	0	0	119.484.000	119.417.950	99,94	66.05	0	7. Komponen
071.A	Penyusunan Program Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	119.484.000	119.417.950	0	0	0	0	119.484.000	119.417.950	99,94	66.05	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	5.189.000	5.188.950	0	0	0	0	5.189.000	5.188.950	100,00	50	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000	100,00	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	107.070.000	107.004.000	0	0	0	0	107.070.000	107.004.000	99,94	66	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	3.025.000	3.025.000	0	0	0	0	3.025.000	3.025.000	100,00	0	0	9. Akun
072	Bimbingan Teknis Supervisi					0	0	48.859.000	48.824.000	0	0	0	0	48.859.000	48.824.000	99,93	35	0	7. Komponen
072.A	Bimbingan Teknis Supervisi					0	0	48.859.000	48.824.000	0	0	0	0	48.859.000	48.824.000	99,93	35	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	4.672.000	4.672.000	0	0	0	0	4.672.000	4.672.000	100,00	0	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	44.187.000	44.152.000	0	0	0	0	44.187.000	44.152.000	99,92	35	0	9. Akun
073	Supervisi Satuan Pendidikan					0	0	413.920.000	413.741.250	0	0	0	0	413.920.000	413.741.250	99,96	178.75	0	7. Komponen
073.A	Supervisi Satuan Pendidikan					0	0	413.920.000	413.741.250	0	0	0	0	413.920.000	413.741.250	99,96	178.75	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	25.549.000	25.381.250	0	0	0	0	25.549.000	25.381.250	99,34	167.75	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	6.760.000	6.750.000	0	0	0	0	6.760.000	6.750.000	99,85	10	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	52.100.000	52.100.000	0	0	0	0	52.100.000	52.100.000	100,00	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	322.611.000	322.610.000	0	0	0	0	322.611.000	322.610.000	100,00	1	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	6.900.000	6.900.000	0	0	0	0	6.900.000	6.900.000	100,00	0	0	9. Akun
083	Pelaksanaan Pengumpulan Data Mutu Pendidikan					0	0	167.481.000	163.798.446	0	0	0	0	167.481.000	163.798.446	97,80	3.682.554	0	7. Komponen
083.A	Pelaksanaan Pengumpulan Data Mutu Pendidikan					0	0	167.481.000	163.798.446	0	0	0	0	167.481.000	163.798.446	97,80	3.682.554	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	15.880.000	14.856.000	0	0	0	0	15.880.000	14.856.000	93,55	1.024.000	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	2.650.000	0	0	0	0	0	2.650.000	0	0,00	2.650.000	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	10.207.000	10.206.646	0	0	0	0	10.207.000	10.206.646	100,00	354	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	50.400.000	50.400.000	0	0	0	0	50.400.000	50.400.000	100,00	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	84.744.000	84.735.800	0	0	0	0	84.744.000	84.735.800	99,99	8.2	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	100,00	0	0	9. Akun
03.WA	Program Dukungan Manajemen					9.534.239.000	9.527.074.744	6.400.020.000	6.383.674.611	176.729.000	176.328.600	0	0	16.110.988.000	16.087.077.955	99,85	23.910.045	0	3. Program
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah					9.534.239.000	9.527.074.744	6.400.020.000	6.383.674.611	176.729.000	176.328.600	0	0	16.110.988.000	16.087.077.955	99,85	23.910.045	0	4. Kegiatan
2005.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	100,00	9.534.239.000	9.527.074.744	5.829.525.000	5.814.875.511	0	0	0	0	15.363.764.000	15.341.950.255	99,86	21.813.745	0	5. Output
2005.EAA.001	Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	100,00	9.534.239.000	9.527.074.744	0	0	0	0	0	0	9.534.239.000	9.527.074.744	99,92	7.164.256	0	6. Sub Output
001	Gaji dan Tunjangan					9.534.239.000	9.527.074.744	0	0	0	0	0	0	9.534.239.000	9.527.074.744	99,92	7.164.256	0	7. Komponen
001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					9.534.239.000	9.527.074.744	0	0	0	0	0	0	9.534.239.000	9.527.074.744	99,92	7.164.256	0	8. Sub Komponen
511111	Belanja Gaji Pokok PNS					4.050.739.000	4.050.738.180	0	0	0	0	0	0	4.050.739.000	4.050.738.180	100,00	820	0	9. Akun
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					51	50.662	0	0	0	0	0	0	51	50.662	99,34	338	0	9. Akun
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					306.126.000	306.125.340	0	0	0	0	0	0	306.126.000	306.125.340	100,00	660	0	9. Akun
511122	Belanja Tunj. Anak PNS					90.131.000	90.130.472	0	0	0	0	0	0	90.131.000	90.130.472	100,00	528	0	9. Akun
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					25.200.000	25.200.000	0	0	0	0	0	0	25.200.000	25.200.000	100,00	0	0	9. Akun
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					98.255.000	98.255.000	0	0	0	0	0	0	98.255.000	98.255.000	100,00	0	0	9. Akun

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total				Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran		
511125	Belanja Tunj. PPh PNS					10.015.000	10.014.650	0	0	0	0	0	0	10.015.000	10.014.650	100,00	350	0	9. Akun
511126	Belanja Tunj. Beras PNS					233.120.000	233.119.980	0	0	0	0	0	0	233.120.000	233.119.980	100,00	20	0	9. Akun
511129	Belanja Uang Makan PNS					551.464.000	545.977.000	0	0	0	0	0	0	551.464.000	545.977.000	99,01	5.487.000	0	9. Akun
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					171.655.000	171.655.000	0	0	0	0	0	0	171.655.000	171.655.000	100,00	0	0	9. Akun
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)					3.997.483.000	3.995.808.460	0	0	0	0	0	0	3.997.483.000	3.995.808.460	99,96	1.674.540	0	9. Akun
2005.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	100,00	0	0	5.829.525.000	5.814.875.511	0	0	0	0	5.829.525.000	5.814.875.511	99,75	14.649.489	0	6. Sub Output
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					0	0	5.829.525.000	5.814.875.511	0	0	0	0	5.829.525.000	5.814.875.511	99,75	14.649.489	0	7. Komponen
002.A	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					0	0	841.522.000	839.857.137	0	0	0	0	841.522.000	839.857.137	99,80	1.664.863	0	8. Sub Komponen
521111	Belanja Keperluan Perkantoran					0	0	267.866.000	266.328.782	0	0	0	0	267.866.000	266.328.782	99,43	1.537.218	0	9. Akun
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					0	0	195.540.000	195.430.000	0	0	0	0	195.540.000	195.430.000	99,94	110	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	364.916.000	364.898.355	0	0	0	0	364.916.000	364.898.355	100,00	17.645	0	9. Akun
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0	0	13.200.000	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	13.200.000	100,00	0	0	9. Akun
002.B	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN					0	0	1.889.320.000	1.885.592.910	0	0	0	0	1.889.320.000	1.885.592.910	99,80	3.727.090	0	8. Sub Komponen
521111	Belanja Keperluan Perkantoran					0	0	1.676.920.000	1.676.917.710	0	0	0	0	1.676.920.000	1.676.917.710	100,00	2.29	0	9. Akun
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					0	0	212.400.000	208.675.200	0	0	0	0	212.400.000	208.675.200	98,25	3.724.800	0	9. Akun
002.C	PEMELIHARAAN KANTOR					0	0	2.068.120.000	2.059.498.450	0	0	0	0	2.068.120.000	2.059.498.450	99,58	8.621.550	0	8. Sub Komponen
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					0	0	1.650.337.000	1.646.426.645	0	0	0	0	1.650.337.000	1.646.426.645	99,76	3.910.355	0	9. Akun
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					0	0	25.593.000	21.459.600	0	0	0	0	25.593.000	21.459.600	83,85	4.133.400	0	9. Akun
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					0	0	392.190.000	391.612.205	0	0	0	0	392.190.000	391.612.205	99,85	577.795	0	9. Akun
002.D	LANGGANAN DAYA DAN JASA					0	0	1.030.563.000	1.029.927.014	0	0	0	0	1.030.563.000	1.029.927.014	99,94	635.986	0	8. Sub Komponen
521111	Belanja Keperluan Perkantoran					0	0	268.923.000	268.317.375	0	0	0	0	268.923.000	268.317.375	99,77	605.625	0	9. Akun
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat					0	0	27.240.000	27.237.900	0	0	0	0	27.240.000	27.237.900	99,99	2.1	0	9. Akun
522111	Belanja Langganan Listrik					0	0	731.640.000	731.627.487	0	0	0	0	731.640.000	731.627.487	100,00	12.513	0	9. Akun
522112	Belanja Langganan Telepon					0	0	2.760.000	2.744.252	0	0	0	0	2.760.000	2.744.252	99,43	15.748	0	9. Akun
2005.EAC	Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00	0	0	570.495.000	568.799.100	0	0	0	0	570.495.000	568.799.100	99,70	1.695.900	0	5. Output
2005.EAC.970	Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100,00	0	0	570.495.000	568.799.100	0	0	0	0	570.495.000	568.799.100	99,70	1.695.900	0	6. Sub Output
051	Pengelolaan Kepegawaian					0	0	904	904	0	0	0	0	904	904	100,00	0	0	7. Komponen
051.A	Penguatan Kapasitas Pegawai					0	0	904	904	0	0	0	0	904	904	100,00	0	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	904	904	0	0	0	0	904	904	100,00	0	0	9. Akun
052	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan					0	0	24.775.000	24.775.000	0	0	0	0	24.775.000	24.775.000	100,00	0	0	7. Komponen
052.A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan					0	0	24.775.000	24.775.000	0	0	0	0	24.775.000	24.775.000	100,00	0	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	100,00	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	11.875.000	11.875.000	0	0	0	0	11.875.000	11.875.000	100,00	0	0	9. Akun
055	Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan					0	0	398.183.000	398.182.500	0	0	0	0	398.183.000	398.182.500	100,00	500	0	7. Komponen
055.A	Penguatan Layanan Bagi ASN					0	0	398.183.000	398.182.500	0	0	0	0	398.183.000	398.182.500	100,00	500	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	61.160.000	61.160.000	0	0	0	0	61.160.000	61.160.000	100,00	0	0	9. Akun

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total				Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	61.023.000	61.022.500	0	0	0	0	61.023.000	61.022.500	100,00	500	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0	0	276.000.000	276.000.000	0	0	0	0	276.000.000	276.000.000	100,00	0	0	9. Akun
056	Perencanaan Program dan Anggaran					0	0	13.697.000	13.661.800	0	0	0	0	13.697.000	13.661.800	99,74	35.2	0	7. Komponen
056.A	Perencanaan Program dan Anggaran					0	0	13.697.000	13.661.800	0	0	0	0	13.697.000	13.661.800	99,74	35.2	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	1.607.000	1.606.800	0	0	0	0	1.607.000	1.606.800	99,99	200	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	5.700.000	5.700.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	6.390.000	6.355.000	0	0	0	0	6.390.000	6.355.000	99,45	35	0	9. Akun
058	Pengelolaan Data dan Informasi					0	0	132.936.000	131.275.800	0	0	0	0	132.936.000	131.275.800	98,75	1.660.200	0	7. Komponen
058.A	Pengelolaan Data dan Informasi PMP					0	0	132.936.000	131.275.800	0	0	0	0	132.936.000	131.275.800	98,75	1.660.200	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	19.831.000	18.170.800	0	0	0	0	19.831.000	18.170.800	91,63	1.660.200	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	69.590.000	69.590.000	0	0	0	0	69.590.000	69.590.000	100,00	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	37.800.000	37.800.000	0	0	0	0	37.800.000	37.800.000	100,00	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	1.215.000	1.215.000	0	0	0	0	1.215.000	1.215.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000	100,00	0	0	9. Akun
2005.EAD	Layanan Sarana Internal	unit	17	17	100,00	0	0	0	0	176.729.000	176.328.600	0	0	176.729.000	176.328.600	99,77	400.4	0	5. Output
2005.EAD.997	Layanan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	unit	17	17	100,00	0	0	0	0	176.729.000	176.328.600	0	0	176.729.000	176.328.600	99,77	400.4	0	6. Sub Output
997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran					0	0	0	0	176.729.000	176.328.600	0	0	176.729.000	176.328.600	99,77	400.4	0	7. Komponen
997.A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran					0	0	0	0	176.729.000	176.328.600	0	0	176.729.000	176.328.600	99,77	400.4	0	8. Sub Komponen
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0	0	0	0	176.729.000	176.328.600	0	0	176.729.000	176.328.600	99,77	400.4	0	9. Akun
	T O T A L					9.534.239.000	9.527.074.744	10.801.924.000	10.747.531.955	176.729.000	176.328.600	0	0	20.512.892.000	20.450.935.299	99,70	61.956.701	0	